

PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBENUR ACEH DI KOTA LANGSA

¹Syafa Nabila, ²Zainuddin,SH,MH., ³Enny Mirfa, SH,MH.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
syafanabilla@gmail.com, zainuddin@unsam.ac.id, ennymirfa@unsam.ac.id

Abstrak

Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota atau usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan. Di Kota Langsa Upah Minimum mengikuti Upah Minimum Provinsi. Kasus yang di dapat bahwa pengusaha di Kota Langsa masih membayar pekerjanya gaji/upah di bawah Upah Minimum Provinsi. Metode yang digunakan yuridis empiris. Penerapan upah minimum di Kota Langsa di dasarkan pada Keputusan Gubenur Aceh Nomor 560/1526/2020 tahun 2020 tentang Penetapan Upah minimum Provinsi Aceh tahun 2021 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan upah Minimum Propinsi dimana UMP di Aceh sebesar Rp. 3.165.030,- yang ditetapkan. Sementara di Kota Langsa UMP mengacu pada UMP Provinsi. Peranan Kota Langsa terhadap penerapan upah minimum belum maksimal, dilihat masih banyaknya pengusaha khususnya di Kota Langsa belum melaksanakan keputusan Gebenur mengenai upah minimum provinsi. Disarankan agar pengusaha yang ada di kota langsa memberikan upah kepada karyawannya berdasarkan Upah Minimum Provinsi sehingga kesejahteraan karyawan terpenuhi.

Kata Kunci :Penetapan, Upah Minimum, Kota Langsa

Abstract

The minimum wage is the wage set by the Governor, Regent, Mayor or the Wage Council proposal based on the calculation of the minimum monthly living needs. In Langsa City the Minimum Wage follows the Provincial Minimum Wage. The case obtained is that employers in Langsa City still pay their workers salaries/wages below the Provincial Minimum Wage. The method used is juridical empirical. The application of the minimum wage in Langsa City is based on the Aceh Governor's Decree Number 560/1526/2020 of 2020 concerning the Determination of the Aceh Province Minimum Wage in 2021 and Aceh Qanun Number 7 of 2014 concerning Manpower and which stipulates the Provincial Minimum Wage where the UMP in Aceh is Rp. 3,165,030,- specified. While in Langsa City the UMP refers to the Provincial UMP. The role of Langsa City in implementing the minimum wage has not been maximized. It can be seen that there are still many entrepreneurs, especially in Langsa City, who have not implemented the Governor's decision regarding the provincial minimum

wage. It is recommended that employers in Langsa City provide wages to their employees based on the Provincial Minimum Wage so that employee welfare is met.

Keywords: Determination, Minimum Wage, Langsa City

A. PENDAHULUAN

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.¹

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh parapengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/198, upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.²

Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota atau usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan.³ Upah minimum diberikan dengan cara dibayarkan perbulan, dengan kesepakatan buruh upah minimum dapat diberikan per dua minggu, atau dengan penghitungan upah perbulan.⁴

Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Tetapi, bila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat meminta penangguhan pelaksanaan upah minimum dilakukan dengan cara :

¹ Much Nurachmad, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon dan Dana Pensiun Untuk Pegawai dan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2009, halaman 33

² Ilham Kistanto, *Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember*, *Skripsi Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2013, halaman 6

³ Viswandro, *Kamus Istilah Hukum (Sumber Rujukan Peristilahan Hukum)*, Medpress, Yogyakarta, 2014, halaman 173-174

⁴ Anonimous, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007, halaman 184

- (1) Permohonan diajukan oleh pengusaha kepada melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum tanggal diberlakukannya upah minimum.
- (2) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum dilakukan atas dasar kesepatan tertulis anara pengusaha dengan buruh atau serikat buruh.⁵

Menurut Henny Damaryanti, dkk dalam tulisannya yang berjudul Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional menuliskan bahwa upah minimum selain merupakan upaya perlindungan dasar bagi pekerja/buruh, juga sebagai jaring pengaman (*safety net*) yang dimaksudkan agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah.⁶Jaring pengaman (*safety net*) agar upah buruh tidak jatuh ke level terendah. Dengan demikian, istilah upah minimum yaitu gaji atau pendapatan terendah para pekerja atau buruh kerja yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam pembahasan ini khususnya Gubernur Aceh.

Buruh atau pekerja dalam sistem ketenagakerjaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari adanya hak dan kewajiban. Hak-hak buruh secara khusus telah terurai dengan cukup baik dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu hak mendasar bagi buruh sesuai undang-undang tersebut adalah hak atas upah atau imbalan kerja. Dalam konsideran undang-undang ketenagakerjaan, minimal ada dua tujuan umum pembentukan undang-undang tersebut yaitu:

- a. Pembangunan nasional dalam bentuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil.
- b. Menetapkan perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dua poin di atas disebutkan langsung dalam mukaddimah (konsideran) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak buruh atau pekerja secara khusus disebutkan dalam beberapa pasal. Secara umum, hak-hak yang ditetapkan berupa hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bekerja. Kedua hak umum tersebut dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6, masing-masing sebagai berikut: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. (Pasal 5). “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. (Pasal 6). Salah satu hak buruh terkait

⁵*Ibid.*,

⁶Henny Damaryantidkk, Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 1, Nomor 2, 2017, halaman 116

pekerjaan yang telah ia lakukan adalah hak atas upah, berupa imbalan yang sepadan dengan pekerjaannya. Pasal 88 undang-undang ketenagakerjaan, mengatur hak dalam bentuk upah ini secara rinci.

Hak upah dimaksud tidak hanya dalam bentuk upah pokok sesuai dengan waktu kerja, tetapi beberapa hak tambahan lain seperti hak atas upah lembur, hak atas upah kerja pada jam di luar jam kerja dan lainnya. Secara rinci jenis hak para buruh ditentukan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. ayat
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Upah minimum
 - b. Upah kerja lembur
 - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
 - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
 - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
 - f. Bentuk dan cara pembayaran upah
 - g. Denda dan potongan upah
 - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
 - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
 - j. Upah untuk pembayaran pesangon
 - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan⁷

Dari uraian di atas maka masalah yang diangkat adalah Bagaimana penerapan upah minimum di Kota Langsa? Dan, Bagaimana Peranan Kota Langsa terhadap penerapan upah minimum?

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah

⁷Dapat dilihat juga dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

“penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.⁸ Penelitian hukum dilakukan meneliti dengan menggunakan bahan dari pustaka/data sekunder, disebut dengan penelitian hukum normatif/penelitian hukum pustaka (penelitian hukum sosiologis/empiris dan meneliti data primer.⁹ Penelitian yang digunakan kualitatif karena lebih mengutamakan data berasal catatan, wawancara, catatan/memo-memo, dokumen resmi. Sehingga peneliti menggunakan metode mencocokkan data dilapangan, realita empirik dan teori yang ada.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Upah Minimum di Kota Langsa

Menurut Anton Pradjasto dan kawan-kawan, penetapan upah dalam ketenagakerjaan adalah bagian dari upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatk hususnya buruh. Hak-hak buruh dalam bentuk upah tidak hanya berlaku pada masa reformasi saat ini, tetapi jauh sebelumnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru juga ditetapkan, namun berbeda dalam penetapan upah. Pada masa Orde Lama, pengupahan ditekankan pada rasio upah tertinggi dan terendah pada suatu jabatan atau instansi tertentu. Sementara pada masa Orde Baru, pengupahan yang ditetapkan adalah nilai nominal upah.¹¹

Lebih lanjut lagi untuk masa reformasi saat ini, penetapan pengupahan cenderung sama dan sebagai kelanjutan dari masa Orde Baru, di mana pengupahan juga dalam bentuk nilai nominal upah, atau lebih tepatnya upah minimum.¹²

Hak-hak buruh tidak hanya dalam bentuk upah kerja. Undang-undang ketenagakerjaan juga memuat beberapa hak lain yang sifatnya materil maupun non materil lainnya. Di antaranya hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan, baik keselamatan, moral, dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat martabat buruh. Hak-hak tersebut dituangkan dalam Pasal 86 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan;

⁸ Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

⁹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, halaman 131

¹¹ Marlindawati, Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Buruh Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2020, halaman 26

¹² Ibid., halaman 27

dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.¹³

Berdasarkan uraian di atas, hak buruh dalam ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut dalam soal upah kerja, tetapi beberapa hal lain dalam bentuk perlindungan kesehatan dan hak-hak atas penjagaan moral dan perilaku asusila yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Namun, hak upah adalah hak paling utama bagi buruh sehingga undang-undang menetapkan bentuk dan criteria upah sebagaimana Pasal 88 telah disebutkan sebelumnya dimuat secara rinci, baik dalam bentuk hak upah pokok, juga upah kerja lembur dan kerja di luar jam kerja

Penetapan upah minimum dipandang sebagai solusi agar para pekerja dapat menghidupi diri dan keluarganya disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional. Satu sisi, keadaan ekonomi yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain, misalnya perbedaan harga bahan makanan pokok, justru menjadi bagian dari acuan pentingnya penetapan upah minimum.¹⁴

Menurut Edytus dan Jehani dalam tulisannya yang berjudul Hak-hak pekerja perempuan menyebutkan setidaknya ada 5 (lima) aspek yang menjadi acuan dalam penetapan upah kerja minimum, yaitu:

- a. Kebutuhan hidup minimum (KHM),
- b. Indeks harga konsumen (IHK),
- c. Kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan,
- d. upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, dan
- e. kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.¹⁵

Untuk itu, perbedaan tingkat ekonomi dan keadaan perkembangan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum bagi pekerja atau buruh adalah bentuk perlindungan dan usaha mewujudkan keadilan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Jadi, keadilan

¹³*Ibid.*,

¹⁴Wawancara dengan Eddy Mukhti Kepala Bidang Ketenagakerjaan Pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsatanggal 16 April 2021 (diolah)

¹⁵Edytus Edisu dan Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Visi Media, Tangerang, 2006, halaman 7.

adalah salah satu tujuan utama dari penetapan upah bagi pekerja. Hal ini tentu bagian dari usaha pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan pekerja berikut keluarganya.

Penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditentukan oleh dewan pengupahan yang anggotanya terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pakar praktisi. Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).¹⁶

Dengan demikian Penerapan upah minimum di Kota Langsa di dasarkan pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1526/2020 yang menetapkan upah Minimum Propinsi dimana UMP di Aceh sebesar Rp. 3.160.000,- Sementara di Kota Langsa UMP mengacu pada UMP Provinsi

2. Peranan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Penerapan Upah Minimum

Pemerintah setiap tahun atau sekali dalam dua tahun menetapkan upah minimum untuk setiap provinsi atau untuk beberapa daerah kabupaten yang berdekatan. Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk:

- a. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar yang surplus, yang mendorong mereka menerima upah di bawah tingkat kelayakan.
- b. Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja oleh pengusaha yang memanfaatkan kondisi pasar kerja untuk akumulasi keuntungannya;
- c. Sebagai jaring pengaman untuk tingkat upah karena satu dan lain hal jangan turun lagi.
- d. Mengurangi tingkat kemiskinan absolute pekerja, terutama bila upah minimum tersebut di kaitkan dengan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.
- e. Mendorong peningkatan produktivitas baik melalui perbaikan gizi dan kesehatan pekerja maupun melalui upaya manajemen untuk memperoleh kompensasi atas peningkatan upah minimum.
- f. Meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.

¹⁶ Ilham Kistanto, *Op. Cit.*, halaman 8

g. Menciptakan hubungan industrial yang lebih aman dan harmonis.¹⁷

Dasar hukum upah bagi buruh mengacu pada beberapa regulasi umum, yaitu UUD NKRI Tahun 1945, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Permenker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, dan Inpres No. 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Dasar hukum upah secara khusus diatur dalam kebijakan atau peraturan gubernur untuk masing-masing provinsi. Dalam sub bahasan selanjutnya, secara khusus akan dikemukakan regulasi upah minimum di Provinsi Aceh.

Upah yang diterima pekerja/buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan upah seorang dapat mewujudkan impian cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang sangatlah mempengaruhi upah.¹⁸

Perkembangan upah minimum Kota Langsa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, yaitu di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, ketentuan UMP mengalami kenaikan meski tidak begitu signifikan. Di tahun 2016, UMP sebesar Rp. 2.118.500, di tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000, di tahun 2018 sebesar Rp. 2.700.000, dan di tahun 2019 sebesar Rp. 2.916.810. dan di tahun 2020 sebesar Rp. 3.165.030,- Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui kenaikan jumlah UMP tiap tahunnya naik dengan kisaran Rp 200.000 per tahun. Upah Minimum di Kota Langsa mengikuti Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Gubernur. Perkembangan atau kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun karena ingin menyesuaikan upah yang layak dan patut diterima oleh pekerja. sedangkan di tahun 2021 UMP Provinsi Aceh menjadi Rp. 3.165.030,- artinya UPM tidak naik dari tahun sebelumnya karena efek dari pandemic Covid-19.¹⁹

Dilihat dari sisi yuridis, Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Hanya saja, upah para pekerja di Kota Langsa jauh dari UMP yang ditetapkan. Banyak pengusaha mengabaikan peraturan gubernur dan menetapkan besaran upah sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Aceh, khususnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan langsung kepada para pegawai, dan menanyakan fakta besaran upah yang

¹⁷*Ibid.*, halaman 7-8

¹⁸Soedjardi, *Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, halaman 11

¹⁹Wawancara dengan Eddy Mukhti Kepala Bidang Ketenagakerjaan Pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa tanggal 16 April 2021 (diolah)

diberikan. Hal ini diharapkan untuk dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan. Bagi pekerja hendaknya melakukan pengaduan kepada pihak terkait, boleh jadi kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tentang adanya ketidak sesuaian gaji atau upah yang mereka terima dengan peraturan yang dimakud. Hal ini bagian dari upaya penerapan peraturan yang ada menjadi lebih baik.

Dari uraian di atas maka Peranan Kota Langsa terhadap penerapan upah minimum belum maksimal di bisa dilihat masih banyaknya pengusaha khususnya di Kota Langsa belum melaksanakan keputusan Gebenur mengenai upah minimum provinsi

D. SIMPULAN

Penerapan upah minimum di Kota Langsa di dasarkan pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1526/2020 tahun 2020 tentang Penetapan Upah minimum Provinsi Aceh tahun 2021 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan upah Minimum Propinsi dimana UMP di Aceh sebesar Rp. 3.165.030,- yang ditetapkan. Sementara di Kota Langsa UMP mengacu pada UMP Provinsi. Peranan Kota Langsa terhadap penerapan upah minimum belum maksimal di bisa dilihat masih banyaknya pengusaha khususnya di Kota Langsa belum melaksanakan keputusan Gebenur mengenai pengawasan upah minimum provinsi

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

- Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012
- Anonimous, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2007
- EdytusEdisu dan Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Visi Media, Tangerang, 2006
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004
- Much Nurachmad, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon dan Dana Pensiun Untuk Pegawai dan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2009
- Soedjardi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008
- SoerjonoSoekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011
- Viswandro, *Kamus Istilah Hukum (SumberRujukan Peristilahan Hukum)*, Medpress, Yogyakarta, 2014

2. *Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1526/2020

3. *Sumber Lain*

Henny Damaryantidkk, Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 1, Nomor 2, 2017

Ilham Kistanto, Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember, *Skripsi Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2013

Marlindawati, Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Buruh Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh), *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2020